

THE OPTIMIZATION THE USE OF INDONESIAN LANGUAGE IN THE PUBLIC SPACE FOR FOREIGNERS AS FOREIGN LANGUAGE CONTROL TOWARDS GOLD INDONESIA 2045

Annisa Anita Dewi¹, Dani Muldiana²

¹Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya

²SDIT Abu Bakar Shiddiq

Pos-el: annisaanitadewi@gmail.com

Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih sangat perlu perhatian dari berbagai pihak terutama dari pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pengguna, terutam penggunaan bahasa asing yang semakin merajalela sehingga lambat laun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia semakin tergeser. Terlebih bangsa Indonesia masih labil dalam menyikapi penggunaan bahasa. Optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang berlaku juga bagi Warga Negara Asing (WNA) bukan berarti antipati atau menutup diri dari bahasa internasional lainnya, melainkan sebagai bentuk upaya dalam menjaga identitas bangsa dan kesatuan bangsa itu sendiri serupa dengan negara-negara lainnya yang tetap menghormati penggunaan bahasa nasionalnya daripada bahasa asing meskipun mereka bisa atau menguasainya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan studi literatur dengan desain penelitian kualitatif. Dalam implementasinya optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia meskipun telah diatur dalam undang-undang, lebih tepatnya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dipertegas dengan UU RI No. 24 Tahun 2009, bukan hanya tugas pemerintah meski saat ini sangat diperlukan aturan, dan kontrol pemerintah yang lebih tegas dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat juga sebagai penutur dan pengguna bahasa. Optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) merupakan proses peningkatan dan nilai tambah yang dapat terbangun dengan sistem inovasi nasional (dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kebijakan), juga sebagai upaya dalam manifestasi pengendalian bahasa asing di ruang publik menuju Indonesia Emas, bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa dan setara dengan bahasa asing atau internasional lainnya. Optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik memberikan pengaruh dan kontribusi yang cukup besar terhadap politik, perekonomian sampai hubungan diplomasi negara.

Kata-kata kunci: bahasa, bahasa Indonesia, pengendalian, bahasa asing

Abstract

The use of Indonesian language in the public space is still very necessary attention from various parties, especially from the government as policy makers and the community as users, especially the use of foreign languages increasingly rampant so gradually the

position and function of the Indonesian language increasingly displaced. Moreover, the Indonesian nation is still unstable in addressing the use of language. The optimization of the use of Indonesian language in the public sphere that applies to foreigners also does not mean antipathy or to close themselves from other international languages, but as a form of effort in maintaining the identity of the nation and the unity of the nation itself is similar to other countries that still respect use of the national language rather than foreign languages even if they can or master it. The research method used is case study and literature study with qualitative research design. In the implementation of the optimization of the use of Indonesian language even though it has been regulated in law, more precisely about the use of Indonesian language in the public sphere reinforced by RI Law no. 24 of 2009, is not only a government task, although nowadays the rule is required, and government control is more assertive in the use of Indonesian language in the public space. However, it is the responsibility of the community as well as speakers and language users. Optimizing the use of Indonesian language in public spaces applicable to Foreigners is a process of enhancement and added value that can be built with national innovation system (in this case government as having policy), as well as efforts in manifestation of foreign language control in space public to Indonesia Gold, that the Indonesian language is the identity of the nation and the equivalent of other foreign or international languages. Optimizing the use of Indonesian language in the public sphere provides considerable influence and contribution to politics, the economy to the relationship of state diplomacy.

Keywords: *language, Indonesian language, control, foreign language*

PENDAHULUAN

Penggunaan bahasa Indonesia selayaknya sesuai kaidah kebahasaan serta baku baik diimplementasikan secara lisan maupun non lisan. (baca: tertulis). Fenomena penggunaan bahasa Indonesia saat ini realitanya belum terimplementasi secara optimal terutama di ruang publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahasa memiliki pengertian bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga dapat kita pahami sebagai alat untuk berkespresi dalam percakapan, sebagai alat untuk berkomunikasi bahkan sebagai salah satu media untuk bertukar pikiran.

Lebih jauh lagi Hadi (hlm. 04, 2010) menyatakan bahwa bahasa adalah yang paling baik dalam menunjukkan identitas kultural suatu bangsa. Dengan kata lain bahasa menunjukkan bangsa. Itu sebabnya penting bagi bangsa Melanesia melestarikan sekitar 250 bahasa etnisnya dari arus besar dominasi ‘bahasa Indonesia’. Sejauh mana dominasi itu? Apa dampaknya? Bagaimana proses historisnya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penting sebagai upaya melestarikan identitas bangsa Melanesia, yang selama ini

‘lebur’ dalam “NKRI”. Dari penjelasan Hadi tersebut bisa kita ketahui bahwa bahasa juga berperan sebagai identitas dan alat pemersatu.

Hadi juga menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang dari pada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis (*lingua franca*) yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia.

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai jenis suku dan etnis, tentunya masing-masing suku dan etnis tersebut memiliki bahasa tersendiri yang acapkali kita sebut dan kita kenal dengan bahasa daerah. Guna untuk merekatkan dan sebagai media untuk berkomunikasi bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu dan ditetapkan sebagai bahasa nasional. Saat kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, yakni Ir. Soekarno pada saat itu bahasa Indonesia memiliki kejayaan dan sempat diusulkan sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara.

Jika ditelisik lebih dalam lagi, misalnya ketika Warga Negara Asing (WNA) mengunjungi negara Perancis, masyarakat di sana akan jauh lebih menghormati setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berusaha melakukan percakapan menggunakan bahasa mereka daripada Warga Negara Asing (WNA) yang menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi meskipun masyarakat di sana mengerti. Hal tersebut tidak hanya berlaku di Negara Perancis, melainkan di Negara Jerman hal serupa dilakukan oleh masyarakat pribumi di sana yang lebih menghormati Warga Negara Asing (WNA) berusaha berkomunikasi meskipun tidak fasih menggunakan bahasa mereka di ruang publik. Mendukung pernyataan tersebut Seorang peneliti dari kantor Bahasa Lampung, Sarman (2018) mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia masih latah dengan keinggris-ingrisan atau kebarat-baratan dalam berbahasa. Anggapan bahwa bahasa asing memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia ternyata belum tercabut sepenuhnya dari benak masyarakat. Bahasa asing dianggap lebih modern, bahasa Indonesia dianggap tertinggal, dan bahasa daerah dianggap kuno.

Contoh tersebut mengenai penggunaan bahasa nasional di ruang publik dan berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke negara tersebut seyogyanya diapresiasi. Dengan diberlakukannya penggunaan bahasa nasional di ruang publik sebagai

alat komunikasi dan berlaku untuk Warga Negara Asing (WNA) dapat memberikan lebih banyak sisi positif yang diperoleh. Sedangkan realita saat ini orang-orang di Indonesia dalam penggunaan bahasa di ruang publik tidak sedikit yang masih menggunakan bahasa yang tidak baku baik secara lisan maupun tertulis, misalnya penggunaan bahasa frotkem atau bahasa gaul. Dan dalam penggunaan bahasa di ruang publik, orang Indonesia cenderung mengikuti kebahasaan atau bahasa pengantar yang dikomunikasikan oleh Warga Negara Asing (WNA). Contohnya ada seorang penjual batik yang memiliki kios, kemudian datanglah salah seorang pembeli yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) menanyakan harga dan kualitas barang tersebut, secara spontan orang Indonesia akan berkomunikasi mengikuti bahasa yang digunakan oleh Warga Negara Asing (WNA) di ruang publik. Tidak berhenti sampai di sana, banyak sekali kios-kios bahkan petunjuk-petunjuk yang terdapat di ruang publik cenderung menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri.

Padahal jika bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar maupun bahasa yang dijadikan rujukan bagi Warga Negara Asing (WNA) di ruang publik diperoleh beberapa manfaat positif yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

1. Mengenalkan bahasa Kesatuan, bahasa Nasional yang digunakan sebagai bahasa pengantar, keuntungan lebih diperoleh juga oleh Warga Negara Asing (WNA) sehingga mereka dapat mengenal dan memperkaya kebahasaan;
2. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di ruang publik yang berlaku untuk Warga Negara Asing (WNA) juga memberikan sumbangsih yang sangat besar, sebagai kekuatan yang meneguhkan identitas bangsa Indonesia;
3. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang berlaku juga untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah sebagai upaya pengendalian bahasa asing;
4. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bagi Warga Negara Asing (WNA) merupakan salah satu bentuk pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia.

Maka dari itu, dalam implementasi optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang berlaku juga untuk Warga Negara Asing (WNA) diperlukan ketegasan dan keteraturan yang mengikat, sehingga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa yang digunakan di ruang publik bagi Warga Negara Asing (WNA) pun menjadi poin penting sebagai simbol identitas bangsa, sebagai sarana strategi untuk memahami

pola pikir atau pikiran penutur bahasa dan media untuk mengenalkan kekayaan dan keaneragaman budaya di Indonesia itu sendiri.

Akses komunikasi ruang publik saat ini semakin terbuka lebar. Banyak tempat yang memang dibangun untuk mendukung terjadinya komunikasi publik untuk lebih memajukan peradaban masyarakat sosial termasuk sekolah, dilansir dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/> dalam Lida Sari, dkk (2013). Selain bermanfaat bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai pengantar di ruang publik, secara tidak langsung melatih masyarakat itu sendiri untuk menggunakan bahasa yang baku dan sesuai kaidah, karena pada realitanya dari penelitian yang dilakukan oleh Lida Sari, dkk ditemukan berbagai kesalahan dalam penggunaan bahasa di ruang publik diantaranya yaitu mengenai diksi yang termasuk kata serapan bahasa asing, dan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang masih menyalahi kaidah kebakuan tata bahasa Indonesia. Diksi dalam kegiatan menulis menentukan penyampaian pokok pikiran sampai ke pembaca dengan jelas. Dalam ragam tulis yang berada di ruang publik penulisan kata gabungan (berimbuhan) yang ditulis terpisah dari kata dasarnya merupakan kesalahan yang fatal. Berikutnya fokus pada struktur kalimat meliputi struktur gramatikal dan keefektifan kalimat dalam sumber data.

LANDASAN TEORI

Semula bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu, meninjau dari aspek sejarah Hadi (hlm. 07, 2010) menjelaskan bahwa secara sejarah bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada kongres nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa: “Jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesustraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tapi dari dua bahasa itu bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan”.

Lebih dalam lagi Hadi menjelaskan, secara sosiologis kita bisa mengatakan bahwa Bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga ikrar Sumpah Pemuda yaitu “kami putera-puteri Indonesia

menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”, namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Indonesia.

Sejalan dengan itu, Tuhusetya (2009) mengemukakan bahwa berbahasa sangat erat kaitannya dengan kebebasan seseorang dalam berekspresi. Ekspresi inheren dengan gaya dan kepribadian seseorang yang sangat personal sifatnya. Kalau kebebasan berekspresi yang bersifat personal itu lantas diatur dan dibatasi oleh UU, lantas di mana lagi hakikat manusia sebagai makhluk sosial mesti diposisikan? Bukankah (hampir) setiap ruang dan waktu kita butuh berkomunikasi dengan sesama? Berbahasa pun sangat erat kaitannya dengan kultur dan kebiasaan seseorang. Berhubungan dengan itu bahasa sebagai sarana berekspresi dan media yang menghubungkan komunikasi antar personal, Sukanto (1987) menjelaskan dengan adanya dorongan pada manusia untuk mengadakan hubungan dengan manusia lain, maka kemudian terbentuklah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merupakan suatu keterkaitan dengan yang lainnya.

Penggunaan bahasa asing di ruang publik, selain bahasa Inggris adalah bahasa Cina dan bahasa Arab. Bahasa Cina bisa kita lihat di kawasan pertokoan kota-kota besar di Indonesia. Sedangkan penggunaan bahasa Arab bisa kita saksikan di kawasan tertentu seperti di daerah Puncak, Bogor dan Cianjur. Fenomena ini terjadi sejak beberapa tahun terakhir, menyusul euforia Era Reformasi. Berbagai peraturan yang melarang penggunaan bahasa Mandarin dinyatakan tak berlaku sejak masa kepemimpinan Presiden Gus Dur. Pada era Orde Lama, Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) menerbitkan Peraturan Peperti No. 3 Tahun 1960 yang melarang penerbitan surat kabar dan majalah yang tidak berbahasa Latin, Arab atau daerah. Dengan demikian, harian beraksara Cina dilarang. Mengingat peran RRC, Taiwan, dan Hongkong era 1970-an makin kuat dalam perekonomian dan politik di Asia Pasifik, Indonesia tidak bisa mengelak untuk tidak berhubungan dengan mereka. Tetapi, untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia, pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan Koperasi kala itu, Radius Prawiro, mengeluarkan larangan impor, memperdagangkan, dan mengedarkan segala jenis barang dalam huruf Cina. Langkah itu ditempuh semata-mata untuk kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa serta peningkatan pembinaan kesatuan bahasa nasional. Hal ini diperkuat kemudian disusul dengan dikeluarkannya surat dari Pangkoptib dan Dirjen PPG Depen, 18 Januari 1979, yang melarang penggunaan aksara Cina dalam penerbitan pers dan nonpers di Indonesia.

Hal yang sama dilakukan oleh Jaksa Agung. Melalui putusan No. Kep-029/JA/6/1979, Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan dengan bahasa dan aksara Cina Mandarin atau dialek lainnya. Sejak era reformasi, semua larangan itu diabaikan. Penggunaan bahasa Cina di Indonesia kian meluas. Papan nama pertokoan dan rumah makan banyak yang menggunakan bahasa Cina. Penggunaan bahasa asing, baik bahasa Inggris, Cina, dan Arab terjadi karena berkembangnya bahasa tersebut dalam masyarakat pada era globalisasi. Apalagi, sikap dan mental bangsa Indonesia memang cenderung mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau asing (Harmoko, 2016).

Perkembangan bahasa terus berkembang, selain dari upaya pemerintah menjaga kesatuan dan kebudayaan berbahasa Indonesia dengan menerbitkan larangan tentang segala bentuk pemakaian non bahasa Indonesia pada barang dan produk, juga perlu dicermati penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti pada layanan informasi dan berbagai layanan umum, berkaitan di era globalisasi mental bangsa Indonesia yang mudah terpengaruh oleh bahasa asing.

Berbicara tentang penggunaan bahasa, tidak akan terlepas dari bahasa, pemakai dan pemakaiannya. Bahasa apa yang akan dipilih tentu akan berkaitan dengan siapa yang berbicara, kepada siapa berbicara, apa yang dibicarakan, di mana berbicara. Seperti dikatakan oleh Hudson (1980) ragam bahasa itu bergantung pada *who, what, when, where, why*. Dengan demikian, dalam situasi formal tentulah ragam formal yang dipilih, sedangkan dalam situasi nonformal tentu pula ragam nonformal yang digunakan. Untuk pemilihan ragam nonformal tidaklah perlu dipermasalahkan. Penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur kode dengan bahasa gaul, prokem, slang, ataupun bahasa daerah selagi tidak dipakai dalam situasi formal tidaklah perlu dirisaukan. Namun, yang menjadi kerisauan kalau ragam formal bahasa Indonesia (baku) itu digunakan tidak sebagaimana mestinya. Variasi atau ragam formal itu digunakan, antara lain, dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku pelajaran, karya ilmiah (Nababan, 1984). Sesuai dengan laju perkembangan dunia yang global, bahasa Indonesia ragam baku juga harus digunakan pada layanan umum dan layanan niaga (Indrawati, 2008).

Ketegasan akan aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat diperlukan, selaras dengan itu Indrawati menambahkan dalam menghadapi era globalisasi diperlukan suatu rumusan ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini

mengingat bahwa masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit. Di Indonesia terdapat lebih dari 728 bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah itu hidup dan berkembang serta dipergunakan dengan setia oleh penuturnya. Selain itu, di Indonesia terdapat bahasa asing. Walaupun kedudukan dan fungsi bahasa daerah dan bahasa asing itu sudah diatur penggunaannya, tetap saja pemakaian bahasa daerah dan bahasa asing (Inggris) dipergunakan semauanya oleh pemakainya. Kenyataan itu akan menyudutkan penggunaan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak segera diatur penggunaannya, bahasa Indonesia tidak akan mampu menunjukkan gengsinya, baik di negara sendiri (nasional) maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan studi literatur dengan desain penelitian kualitatif. Studi kasus dilakukan mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik baik oleh penutur dalam hal ini masyarakat maupun media-media yang menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik sebagai sumber data, untuk mendukung data yang dikumpulkan melalui metode studi kasus maka digunakanlah metode studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan esai hasil penelitian sebagai sumber data. Selain itu, instrumen yang digunakan adalah wawancara dan arsip (hasil penelitian). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode alir dari Miles dan Huberman.

PEMBAHASAN

Era globalisasi tidak sepenuhnya bersifat positif dan pula tidak sepenuhnya negatif, salah satunya MEA sebagai manifestasi dari integrasi antar bangsa dampak dari globalisasi. Dengan itu, globalisasi merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan dipersiapkan. Oleh sebab itu, untuk dapat andil maka sumber daya dan bangsa kita harus memiliki kualitas, daya saing dan tak terkecuali bahasa sebagai identitas serta kekuatan bangsa sebagai landasan atau titik tolak, karakter dan manifestasi dari diplomasi bahwa bahasa Indonesia setara dengan bahasa internasional lainnya.

Dari semua fenomena pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tersebut, kita bisa melihat betapa rapuhnya karakter bangsa di masa kini. Seakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang labil, tidak memiliki keteguhan dan

pendirian kuat, serta kehilangan identitas kebangsaannya, karena seperti yang kerap kita dengan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Maka perlu adanya upaya kuat untuk menata dan membangun kembali karakter bangsa bagi generasi pelapis. Selain itu, perlu adanya peraturan keras dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah jelas diatur dalam konstitusi dan undang-undang bahasa. Oleh karena itu, saat ini yang terpenting adalah kesadaran pemerintah Indonesia dan pelaku bahasa itu sendiri untuk mengembalikan identitas bangsa lewat bahasa. Peran pemerintah itu sendiri sudah diatur dalam UU No. 24 Th. 2009, pasal 41. Untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 24 Th. 2009, khususnya pasal 36, 37, 37, dan 39 mengenai aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, media publik, dan informasi-informasi produk barang atau jasa (Dinda, 2013).



Gambar 3.1 Penggunaan bahasa Indonesia di papan iklan
(sumber gambar Indrawati (2012), Jurnal)

Gambar tersebut merupakan contoh dari penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, lebih tepatnya mengenai informasi dan layanan. Dilansir dari penelitian Indrawati (2012), penggunaan bahasa Indonesia pada papan iklan tersebut sudah baku akan tetapi tanda baca

(tanda hubung), huruf miring, penulisan kata terdapat kekeliruan, seperti pada papan iklan berikut (Gambar 3.2 Penggunaan bahasa Indonesia pada papan iklan).

Pada contoh Gambar 3.2 Penggunaan bahasa Indonesia pada papan iklan seyogyanya penulisan FlexiCOMBO itu adalah *Flexi Combo*, penulisan ke 285 adalah ke-265, kata kemana seharusnya ditulis *ke mana*.



Gambar 3.2 Penggunaan bahasa Indonesia pada papan iklan

Berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dalam penelitian Indrawati mengenai survey atau studi kasus mengenai tanggapan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada papan iklan atau layanan dan informasi lainnya seperti brosur, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Menurut 82% responden penggunaan bahasa pada spanduk, papan iklan, brosur perlu diperbaiki. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah kosakata dan kalimat (59%). Penggunaan kosakata nonbaku dan kosakata asing masih perlu dicarikan alternatif bahasa Indonesia bakunya. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa baku itu akan menunjukkan identitas suatu bangsa (62%), sedangkan alasan penggunaan bahasa Indonesia baku akan menunjukkan prestise (20%). Masih menurut responden, penggunaan bahasa pada spanduk,

papan iklan, brosur tidak perlu dipermasalahkan karena bahasa yang digunakan sudah cukup komunikatif (50%), bahasanya sudah baik (20%) yang menjawab sesuai dengan konteks (11%). Lebih lanjut dikatakan oleh para responden, penggunaan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing yang terdapat pada spanduk, papan iklan, dan brosur sebaiknya agak dikurang saja pemakaiannya (46%), sedangkan yang menyatakan sebaiknya digunakan kosakata bahasa baku bahasa Indonesia (39%), dan yang menyatakan tetap digunakan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing (10%). Ini berarti bahwa penggunaan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing pada spanduk, papan iklan, dan brosur boleh saja digunakan karena sesuai dengan kebutuhannya.

Sejalan dengan itu, Dinda (2013) menyatakan bahwa selain tugas pemerintah, yang paling harus memiliki kesadaran adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia harus bisa menjadi masyarakat yang cerdas dalam menanggapi tuntutan zaman, dengan menjadi masyarakat yang cerdas namun juga memiliki identitas dan karakter bangsa yang kuat. Sehingga di manapun ia berada akan dihargai. Maka masyarakat Indonesia mestinya cerdas dalam memilih kapan dia perlu menggunakan bahasa asing dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Karena, yang membuat bahasa Indonesia lebih memiliki tempat adalah penggunaannya itu sendiri.

Selain penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pada layanan dan informasi, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lida Sari dkk mengemukakan mengenai diksi yang termasuk kata serapan bahasa asing, dan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang masih menyalahi kaidah kebakuan tata bahasa Indonesia. Diksi dalam kegiatan menulis menentukan penyampaian pokok pikiran sampai ke pembaca dengan jelas. Dalam ragam tulis yang berada di ruang publik penulisan kata gabungan (berimbuhan) yang ditulis terpisah dari kata dasarnya merupakan kesalahan yang fatal. Berikutnya fokus pada struktur kalimat meliputi struktur gramatikal dan keefektifan kalimat dalam sumber data.

Data yang diperoleh di lapangan saat ini mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih sangat membutuhkan perbaikan, peningkatan dan ketegasan aturan. Jika pada waktu sebelumnya permasalahan penggunaan bahasa di ruang publik adalah multilingualisme bahasa, berbeda dengan saat ini penggunaan bahasa prokem yang di

dominasi oleh kalangan muda sedikit banyak merusak ejaan dan tatanan bahasa Indonesia. Lebih jauh lagi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti pada layanan informasi, layanan umum, papan iklan atau spanduk banyak sekali yang tidak baku.

Hal tersebut diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang Kebahasaan dijelaskan mengenai pengaturan penggunaan bahasa. Rancangan itu disusun untuk melindungi penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam situasi formal. Inti dari rancangan undang-undangan tersebut cakupannya terutama terkait kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah (<http://www2.kompas.com.htm>). Pada bab III pasal 19 butir (5) Rancangan Undang-Undang Kebahasaan dijelaskan informasi layanan umum dan/atau layanan niaga yang berupa rambu, penunjuk jalan, spanduk, papan iklan, brosur, katalog, dan sejenisnya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa pada situasi itu pemakai bahasa harus menggunakan bahasa Indonesia. (Indrawati, 2008). Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dipertegas dengan UU RI No. 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Selain ketidaklaziman pemilihan kata, ditemukan juga penyimpangan ketidaksesuaian pemilihan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Pemilihan istilah menyangkut ketepatan memilih istilah yang sesuai dengan fungsi kata dalam kalimat. Ketidaksesuaian pemilihan kata dapat menyebabkan pembaca salah menginterpretasikan makna dari kalimat yang ditulis. (Nisa dan Suyitno, 2017). Sejalan dengan pernyataan Nisa dan Suyitno, dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Prasetyo (2017) memberikan simpulan, bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat rendah. Bahasa Indonesia semakin terpinggirkan dan bahkan sudah ditinggalkan karena kesadaran masyarakat sudah sangat rendah dan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Masyarakat lebih suka berbahasa asing karena menilai bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU RI No. 24 Tahun 2009 khususnya pasal 26 sampai 40 yang secara jelas membahas tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia.

Optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik didukung dengan ketegasan dan kebijakan pemerintah serta kesadaran masyarakat sebagai penutur atau pengguna bahasa tentunya akan mengalami proses perubahan sosial. Dalam hal ini, Tim Dosen UPI menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dengan melihat

gerakan dan interaksi yang berlangsung, kita sering menggunakan berbagai istilah yaitu: Proses, Evolusi dan progress. Istilah Proses menunjukkan kepada rangkaian interaksi yang berlangsung sehingga suatu keadaan yang satu ke keadaan yang lainnya tanpa ada konotasi nilai. Istilah Evolusi menunjuk kepada keberlangsungan perubahan secara berangsur-angsur ke satu arah tertentu, katakanlah dari masyarakat yang bersahaja kepada masyarakat yang semakin kompleks, juga tanpa konotasi nilai, apakah baik atau buruk. Istilah Progres, bukan sekedar proses, tetapi adalah proses yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan yang dikehendaki suatu masyarakat. Dalam kontes perubahan sosial istilah progress sudah mengandung konotasi nilai (baik, buruk) sedangkan istilah proses hanya sekedar memberikan pembeberan tanpa ada konotasi nilai di dalamnya.

Berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya perubahan sosial, *Spott* membagi lagi menjadi dua macam, yaitu : (1) perubahan episode (*episodic change*) (2) perubahan terpola (*pattened change*). Perubahan episode berlangsung sewaktu-waktu dikarenakan peristiwa-peristiwa tertentu yang tak diperkirakan sebelumnya, sedangkan perubahan terpola berlangsungnya memang direncanakan, diprogramkan, sebagaimana upaya yang dilakukan melalui pembangunan (tim dosen UPI, 2008). Sejalan dengan itu perubahan sosial terhadap optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat dilakukan sesuai dengan perubahan terpola (*pattened change*) yang terprogram dan terencana sehingga memiliki keteraturan yang jelas.

Optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang berlaku juga bagi Warga Negara Asing (WNA) dan sebagai salah satu upaya dalam pengendalian bahasa asing di ruang publik selain dengan penegasan aturan, selayaknya diikuti dengan proses edukasi melalui sosialisasi. Berkaitan bahwa proses sosialisasi atau pendidikan adalah proses homogenitas sosial yang diselenggarakan untuk menyiapkan setiap warga masyarakat. Oleh karena itu, Emil Durkheim (dalam tim dosen UPI, 2008) memberi definisi tentang pendidikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi yang dilakukan oleh generasi orang dewasa kepada mereka yang belum siap untuk melakukan fungsi sosial. Dilansir dari Republika.co.id berkaitan pernyataan Kemdikbud mengenai tak ada sanksi penggunaan bahasa asing di ruang publik, bahwa "tentang bahasa, tak ada sanksi dan denda," kata Kepala BPP bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar dalam konferensi pers menyambut Bulan Bahasa dan Sastra 2017 di Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan, optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia

sebagai bahasa negara di ruang publik dan sebagai upaya pengendalian bahasa asing perlu diikuti oleh aturan yang tegas dan jelas meski tidak harus dikenakan denda serupa saat kemdikbud menegaskan bahasa negara wajib difungsikan pada nama jalan, apartemen, usaha, fasilitas publik. Meski pada kenyataannya belum terealisasi secara penuh, karena untuk mengimplementasikannya perlu peran aktif pemerintah yang tidak hanya sekedar mencetuskan lewat UU dan mengumumkan di media karena informasi tidak akan tersebar secara merata, melainkan perlu adanya sosialisasi, pendekatan dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna dan penutur.

PENUTUP

Optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang terdiri dari bahasa yang digunakan penutur atau pengguna di ruang publik, penggunaan bahasa Indonesia pada informasi dan layanan, pertokoan dan papan iklan merupakan bagian penting dalam identitas negara, kedudukannya sangat fundamental sehingga setara dengan bahasa internasional lainnya dan menjaga kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Bahasa merupakan salah satu kekayaan, sejalan dengan itu Hasta dkk (2011) mengemukakan bahwa hari ini perubahan dalam sistem kekayaan intelektual bukan hanya mencerminkan perubahan ekonomi, tetapi juga perubahan pengaruh politik dan kepentingan negara. Menyikapi rentannya mental bangsa Indonesia yang mudah terpengaruh oleh bahasa asing, terlebih di era saat ini generasi Milenial dan generasi Alfa sebagai salah satu generasi pelapis atau regenerasi yang masih labil dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih tidak sesuai. Terlebih penggunaan bahasa asing dan bahasa prokem di ruang publik lebih mendominasi, semestinya penggunaan bahasa asing di ruang publik dapat dikendalikan dengan optimalisasi bahasa Indonesia di ruang publik seperti halnya era orde baru yang memberikan larangan terhadap penggunaan bahasa asing dalam berbagai produk ataupun surat kabar untuk menjaga kesatuan, kebudayaan bahasa sebagai identitas bangsa Indonesia.

Optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik untuk mengendalikan penggunaan bahasa asing di ruang publik, meliputi bahasa yang digunakan penutur atau pengguna di ruang publik misalnya percakapan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) seyogyanya menggunakan bahasa Indonesia sama halnya dengan negara-negara lain ketika Warga Negara Asing berkunjung ke negaranya

maka harus menggunakan bahasa mereka, sama halnya dengan penggunaan bahasa Indonesia pada informasi dan layanan, pertokoan sampai papan iklan. Hal tersebut berlaku juga di negara-negara lain khususnya negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional atau bahasa pengantar, dan warga negara tersebut lebih menghormati Warga Negara Asing yang berusaha menggunakan bahasa mereka contohnya Jerman dan Perancis. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh, selain dari bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa setara dengan bahasa internasional lainnya juga memberikan peningkatan kualitas dan kapabilitas Warga Negara Indonesia dalam menjaga bahasa kesatuan dan dalam menggunakan bahasa Indonesia seperti ejaan, tanda baca dan kebakuan yang sesuai dengan aturan sehingga menjaga *keajegan* bahasa Indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinda. 2012. Fenomena Terkini Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. <http://daduimaji.blogspot.co.id/2013/02/fenomena-terkini-penggunaan-bahasa-di.html>. [online]. (diakses pada 23 Mei 2018)
- Hadi, Mas'ul. 2010. Perkembangan Bahasa Indonesia. Makalah : Dipresentasikan pada mata kuliah bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Program Studipsikologi Fakultas Dakwah Surabaya
- Harmoko. 2016. Bahasa di Ruang Publik. <http://poskotanews.com/2016/10/27/bahasa-di-ruang-publik/>. [online]. (diakses pada 23 Mei 2018)
- Indrawati, Sri. 2008. Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga, Sudah Benarkah?: Jurnal yang telah dipublikasikan
- Khoerun Nisa dan Imam Suyitno. 2017. Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Teks Terjemahan Mahasiswa: Basindo Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya Vol 1 No 1 - April 2017 (1-13)
- Lida Sari, dkk. 2013. Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulis Di Ruang Publik Sma Negeri 12 Bandar Lampung : Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)
- Lukito Hasta, dkk. 2011. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Sosio Ekonomi Bangsa. Jakarta: Penerbit Suara Bebas
- Prasetyo, Fery. 2017. Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. <https://wasbang9.wordpress.com/2017/09/24/penggunaan-bahasa-indonesia-di-ruang-publik/>. [online]. (diakses 23 Mei 2018)
- Sarman. 2018. Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. <https://lampungpost.id/kolom/laras-bahasa/penggunaan-bahasa-di-ruang-publik/> [online]. (diakses pada 28 Mei 2018)
- Tim Dosen. 2008. Bahan Ajar Sosialisasi Pendidikan. Diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya: Tasikmalaya

- Tuhusetya, Sawali. 2009. Kontrol Bahasa di Ruang Publik. <https://esaisastra.wordpress.com/2009/04/17/kontrol-bahasa-di-ruang-publik/> . [online]. (diakses pada 23 Mei 2018)
- Umi Nur Fadhilah dan Winda Destyana Puteri. 2017. Tak Ada Sanksi Penggunaan Bahasa Asing di Ruang Publik. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/05/oxcqb4359-tak-ada-sanksi-penggunaan-bahasa-asing-di-ruang-publik> [online]. (diakses pada 28 Mei 2018).

